PERUBAHAN PEMERINTAHAN MUKIM DI LANGSA, 1906-1975

M. Zakira^a, Suprayitno^b, Warjio^c

zakir6085@gmail.com, nisanaceh@gmail.com, warjio@gmail.com

^a Universitas Sumatera Utara, Indonesia

^b Universitas Sumatera Utara, Indonesia

^c Universitas Sumatera Utara, Indonesia

ARTICLE INFO

Received: 27 May 2019

Revised: 23 December 2019

Accepted: 23 December 2019

Published: 31 December 2019

Permalink/DOI

10.17977/um020v13i22019p154

Copyright © 2019, *Sejarah dan Budaya*. All right reserved

Print ISSN: 1979-9993

Online ISSN: 2503-1147

ABSTRACT

This article discusses the changes that took place in the mukim institutions in the structure of regional government in Langsa in the period 1906-1975. This article answers the issue of how the structure and function of the mukim institutions changed in Langsa in the period 1906-1975 and how the mukim institutions in the New Order government experienced a setback. This research uses historical methods through four steps: heuristic (collecting historical sources); verification (critical sources review); interpretation (historical analysis and interpretation); and historiography (historical writing). Sources as the historical data which collected from several document and literature from colonial to postcolonial period. This study uses social sciences approaches especially politic, so that theme of this study is political and governmental history. This study found that the mukim institution was an original government institution that had long stood autonomously in Aceh. Mukim experienced many changes both in structure and function in the Dutch colonial era, Japanese Occupation, and the period of Revolution of Independence, and even disappeared during the New Order era. The formation of the mukim area is closely related to the existence of the regulation of social life (adat) and for religious life (law) and as well as later appearing to be a unit of local government.

KEYWORDS

Traditional institution, political and governmental history of Aceh, transition of mukim institution.

ABSTRAK

Artikel ini membahas perubahan yang terjadi pada lembaga mukim dalam struktur pemerintahan daerah di Langsa pada periode 1906-1975. Artikel ini menjawab permasalahan bagaimana perubahan struktur dan fungsi lembaga mukim di Langsa pada periode 1906-1975 dan bagaimana lembaga mukim dalam tatanan pemerintahan Orde Baru mengalami kemunduran. Penelitian ini menggunakan metode sejarah melalui empat tahap: heuristik (pengumpulan sumber sejarah); verifikasi (kritik sumber); interpretasi (analisis sejarah dan penafsiran); dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber sebagai data sejarah yang diperoleh dari sejumlah dokumen dan literatur periode dari periode kolonial hingga pascakolonial. Penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu sosial khususnya politik, sehingga tema penelitian ini adalah sejarah politik dan pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga mukim merupakan lembaga pemerintah asli yang telah lama berdiri secara otonom di Aceh. Mukim mengalami banyak perubahan baik secara struktur maupun fungsi pada zaman kolonial Belanda, zaman Pendudukan Jepang, dan periode Revolusi Kemerdekaan, bahkan hilang pada era Orde Baru. Pembentukan wilayah mukim terkait erat dengan keberadaan untuk pengaturan kehidupan sosial (adat) maupun untuk kehidupan beragama (hukum) dan serta kemudian muncul menjadi unit pemerintah lokal.

KATA KUNCI

Lembaga tradisional, sejarah politik dan pemerintahan Aceh, transisi lembaga mukim.

PENDAHULUAN

Mukim sebagai sebuah lembaga pemerintahan tradisional hanya ada di Aceh. Keberadaan lembaga *mukim* dari masa ke masa mengalami transisi dan perubahan secara perlahan. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579-1586), lembaga *mukim* berada di bawah suatu *Nanggroe* (Negeri) secara otonom. Akan tetapi, sejak Aceh berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Belanda hingga pemerintahan era Orde Baru, kedudukan lembaga *mukim* mengalami perubahan baik tatanan strukturnya maupun fungsinya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga *mukim* pada tiap-tiap periode pemerintahan terjadi di seluruh Aceh, termasuk Langsa.

Berdasarkan data sejarah ditemukan bahwa sebelum tahun 1906 wilayah Langsa terdiri dari 6 *mukim* yang meliputi wilayah: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Manyak Payed, Langsa, Langsa Tunong, dan Kuala Langsa. Kemudian setelah tahun 1907 keenam *mukim* tersebut dilebur menjadi empat *mukim* saja meliputi: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Manyak Payed, dan Langsa. Keempat *mukim* tersebut berada di bawah suatu wilayah pemerintahan daerah setingkat sub-distrik/kecamatan bentukan pemerintah kolonial yang disebut sebagai *Onderafdeeling* Langsa.

Pada masa itu, di Langsa sudah berlangsung industrialisasi perkebunan yang dimulai pada tahun 1906 (Muhajir, 2016). Eksistensi lembaga *mukim* sangat bergantung kepada situasi politik dan pemerintahan lokal yang telah dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah kolonial. Dalam proses itulah pemerintah kolonial memodifikasi lembaga pemerintahan lokal, lahir pula berbagai peraturan perundang-undangan yang baru (Mukhlis, 2015: 22).

Langsa dibangun oleh pemerintah kolonial sebagai daerah ibukota *Afdeeling Oostkust van Atjeh* (*Afdeeling* Aceh Timur) yang statusnya setingkat distrik/kabupaten di bawah pimpinan seorang Asisten Residen. Hal itu juga terkait kepentingan industri perkebunan yang membutuhkan pusat administrasi dan fasilitas perkotaan yang layak. Sejak berlangsungnya modernisasi, terjadi perubahan pada tatanan lembaga *mukim* yang merupakan dampak kebijakan kolonial kala itu. Pemerintahan tradisional dimodifikasi dan dikontrol oleh pemerintah kolonial melalui sistem dualistik (birokrasi kolonial dan birokrasi bumiputra) dan menempatkan amtenar dari kalangan kulit putih di setiap tingkat pemerintahan. Selain itu, pada jabatan *Imeum Mukim* sebagai jabatan utama di lembaga *mukim* selanjutnya ditempati oleh orang kepercayaan pemerintah kolonial. Cara demikian juga dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap rakyat bumiputra, misalnya mengecilkan pengaruh politik-ekonomi seorang kepala negeri yang disebut sebagai *uleëbalang* (hulubalang), dan menghilangkan jabatan di bawahannya yang disebut sebagai *uleëbalang cut* (hulubalang kecil). Cara itu sudah dilakukan sejak Belanda menguasai negeri-negeri di Aceh (Boer, 1917: 74).

Lembaga *mukim* di *Onderafdeeling* Langsa ditetapkan dalam struktur birokrasi bumiputra melalui *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*, 1908 No. 401. Kemudian sejak tahun 1922, lembaga *mukim* berada langsung di bawah *Afdeeling* Aceh Timur. Hal itu

dilakukan karena Langsa merupakan ibukota *Afdeeling* Aceh Timur, sehingga lebih efisien jika lembaga *mukim* berada di bawah kedudukan Asisten Residen.

Artikel ini bertujuan untuk menjawab dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana perubahan struktur dan fungsi lembaga *mukim* di Langsa pada periode 1906-1975? (2) Bagaimana lembaga *mukim* dalam tatanan pemerintahan Orde Baru mengalami kemunduran?

METODE

Studi ini menggunakan metode sejarah. Data penelitian diperoleh dari sejumlah arsip kolonial dan sumber lainnya baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder yang relevan serta mengandung evidensi dan fakta sejarah. Fokus penelitian ini adalah lembaga *mukim* dan perubahannya sebagai lembaga pemerintahan tradisional Aceh yang tetap eksis selama era kolonial Belanda hingga era Orde Baru. Lingkup temporal mencakup periode 1906-1975, di mana tahun 1906 merupakan awal pembentukan pemerintahan kolonial di Langsa dan lembaga *mukim* mengalami perubahan dalam kekuasaan kolonial dan tahun 1975 merupakan akhir dari era Orde Baru di Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mukim pada Zaman Kesultanan Aceh

Sejak zaman kesultanan, *nanggroe* (negeri) di Aceh dipimpin oleh seorang *uleëbalang* sebagai kepala wilayah. Ada banyak sekali jumlah *nanggroe* di Aceh. *Uleëbalang* dan keturunannya diberi gelar *Teuku* untuk laki-laki atau *Cut* untuk perempuan. Rahmadsyah dalam *Menelusuri Jejak Sejarah Langsa* mengutarakan bahwa *uleëbalang* sendiri adalah golongan bangsawan dalam masyarakat Aceh. Dengan dipercayakan sebagai pemimpin sebuah Negeri atau *nanggroe*, yaitu wilayah setingkat Kecamatan dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang. Istilah *uleëbalang* tidak mengacu pada pengertian kepala laskar, karena melainkan lebih berarti kepala pemerintahan daerah sendiri otonom dan pemangku hukum adat di daerahnya. Para *uleëbalang* inilah yang merupakan raja sebenarnya di wilayah mereka masing-masing dengan penguasaan atas tanah dan rakyatnya, bahkan berhak menarik pajak dan memiliki otoritas untuk melakukan perdagangan dan perang. Seseorang diangkat dan disahkan sebagai *uleëbalang* oleh Sultan Aceh. Para *uleëbalang* yang jumlahnya banyak ini tunduk di bawah otoritas sultan secara federatif dalam wilayah besar Kesultanan Aceh. *Uleëbalang* yang memimpin pemerintahan di sebuah *nanggroe* menjalankan menaati setiap perintah sultan serta membayar upeti kepada kesultanan (Rahmadsyah, dkk. 2014: 121).

Struktur kekuasaan Aceh memiliki hierarki yang konsentris dan berjenjang semenjak pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang membagi sistem administrasi politik Aceh dengan institusi *nanggroe* dan *mukim*, sebagai alat untuk menciptakan kelas bangsawan baru yang menjadi alat penopang kekuasaannya (Reid, 2005: 3). *Mukim* awalnya dibentuk sebagai daerah yang terdiri dari beberapa kampung untuk kepentingan melakukan salat Jumat, ia merupakan lembaga adat yang memiliki

kedekatan dengan masyarakat. Dalam struktur fungsionalnya, *mukim* menjalankan tugas untuk mengkoordinir *gampong-gampong* (kampung-kampung) yang berada di bawah otoritasnya. *Nanggroe* sebagai struktur pemerintahan yang lebih tinggi berfungsi menghubungkan *mukim* dengan kesultanan. Dengan demikian *mukim* dalam hierarki kepemimpinan di Aceh dari yang paling rendah sampai paling tinggi adalah: *gampong*, *mukim*, *nanggroe*, kesultanan.

Struktur sosial masyarakat Aceh kental dengan agama Islam. Oleh karena itu, dapat dibedakan menjadi dua yaitu golongan umara dan golongan ulama. Golongan umara yaitu pemerintah atau pejabat dalam satu unit kekuasaan seperti sultan memimpin kesultanan, *uleëbalang* memimpin *nanggroe*, *Imeum Mukim* memimpin *mukim*, dan *geuchik* memimpin *gampong*. Golongan ini dapat diidentifikasi sebagai pemimpin adat, pemimpin keduniawian atau kelompok elite sekuler. Sementara itu golongan ulama adalah pemimpin yang mengurus masalah keagamaan dan dapat disebut juga sebagai kelompok elite religius seperti *Tengku Meunasah* dan *Qadli*.

Lembaga *mukim* berada di bawah *nanggroe*. Pada masa kesultanan *mukim* dipimpin oleh seorang *Imuem Mukim*, yaitu orang yang merangkap jabatan administratif dan agama. Biasanya jabatan itu diberikan kepada orang-orang yang berasal dari orang-orang kepercayaan oleh Sultan. Pada awalnya *uleëbalang* di Langsa juga memiliki wewenang untuk menetapkan hukuman atau pengadilan adat. *Uleëbalang* memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa di kalangan rakyatnya. Di sisi lain, wewenang *uleëbalang* tersebut juga dibatasi dan diberi kepada *Imeum Mukim*, misalnya masalah terkait agama. Hal ini untuk mencegah seorang *uleëbalang* menjadi pemimpin yang otoriter. *Imeum Mukim* harus mampu menjadi pimpinan keagamaan dan wilayah yang sudah ditentukan, misalnya suatu daerah *Mukim* mencakup beberapa *gampong* (kampung/desa). Dalam suatu *Mukim* harus memiliki paling tidak sebuah masjid untuk menampung jamaah salat Jumat dari beberapa *gampong* di bawahnya. Sementara untuk menampung jamaah salat fardhu lima waktu di masing-masing *gampong* terdapat sebuah *meunasah* atau langgar.

Bagan 1. Hierarki Pemerintahan di Aceh pada Zaman Kesultanan

Berkaitan dengan hal ini, pada awalnya *mukim* ditetapkan berdasarkan keberadaannya berkaitan dengan salat Jumat. Sebuah rutinitas masyarakat terkait

kepercayaan sebagai penganut agama Islam. Kemudian, *mukim* merupakan suatu kebutuhan untuk memperkuat kesultanan Aceh. Oleh karena itu, para pemuka agama merupakan tokoh yang cukup dihormati dan disegani oleh masyarakat. *Mukim* ditetapkan sebagai salah satu level pemerintahan dalam Kesultanan Aceh. *Mukim* dalam perkembangannya tidak lagi hanya sebatas institusi biasa, melainkan mengurus masalah keagamaan tetapi juga terlibat dalam urusan administrasi pemerintahan.

Mukim pada Zaman Kolonial Belanda

Sejak periode Perang Aceh (1873-1918), kolonialis Belanda menempatkan orang-orang kepercayaannya (baik orang kulit putih maupun bangsawan yang loyal) di seluruh daerah taklukannya sebagai kepala pemerintah setempat. Belanda juga membuat sistem dualistik pemerintahan: pemerintahan tidak langsung (*indirect bestuurgebied*) dan pemerintahan langsung (*direct bestuurgebied*). Di daerah-daerah yang diberlakukan pemerintahan tidak langsung, Belanda mengangkat seorang bangsawan lokal sebagai pejabat kolonial (*zelfbesturder*) untuk menjadi kepala daerah secara otonom. Sebaliknya, di daerah-daerah yang diberlakukan pemerintahan langsung, Belanda mengangkat pejabat dari kalangan kulit putih baik sipil (*controleur*) maupun militer (*gezaghebber*) dan Asisten Residen sebagai kepala daerah yang langsung di bawah birokrasi pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintah kolonial Hindia Belanda biasanya menerapkan pemerintahan tidak langsung di daerah-daerah bekas kerajaan, termasuk Aceh. Pemerintahan di Aceh dijalankan dengan memanfaatkan pemerintahan lokal yang sudah ada. Setiap calon pemangku jabatan *uleëbalang*, sangat diharuskan menandatangani pernyataan ikrar setia kepada pemerintah Kerajaan Belanda terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi *zelfbestuur* di daerahnya.

Tidak semua lembaga tradisional dipertahankan oleh kolonial Belanda untuk membantu menjalankan pemerintahan, salah satu yang dihilangkan eksistensinya adalah *Toeha Peuët*. Fungsi utama dari *Toeha Peuët* adalah sebagai pengawas atau dewan penasehat pemerintahan *mukim*. Sejak Belanda menguasai Aceh, *mukim* untuk pertama kalinya menjalankan tugasnya tanpa pengawas atau dewan penasehat (Vleer, 1935: 461).

Kolonialis Belanda berhasil menghapus sistem dan tatanan pemerintahan Kesultanan Aceh dan membangun sistem baru, sehingga ada lembaga tradisional yang hilang dan mengalami perubahan. Salah satunya yang mengalami perubahan adalah lembaga *Mukim*. Awalnya *mukim* dipimpin oleh *Imuem Chik* atau *Imeum Mukim* atau *Tengku*, kemudian dialihkan di bawah kepemimpinan *Uleëbalang* kepercayaan Belanda. Hal ini dipandang lebih menguntungkan bagi Belanda karena lebih efisien dan memudahkan kontrol atas situasi dalam negeri. Sikap politik Belanda ini merupakan pelemahan terhadap lembaga adat dan Islam seperti yang ada di lembaga *mukim*. Tampaknya Belanda menjadi sangat waspada dan antisipatif dengan pemimpin yang kharismatik dan religius sejak Perang Aceh kian menyulitkan mereka karena para ulama mampu menyebarkan semangat jihad (Perang Sabil) bersama masyarakat. Sejak itu, pemimpin agama tidak boleh lagi menjadi pemimpin di suatu wilayah. Akibatnya muncul konflik baru di kalangan masyarakat Aceh sejak *mukim* diintervensi oleh Belanda. Ini

semua merupakan saran politik Snouck Hurgronje kepada pemerintah Hindia Belanda dan kemudian direalisasikan sejak J.B. van Heutsz menjadi Gubernur Militer di Aceh (Zakir, 2013: 56).

Pemerintahan di masing-masing daerah taklukan Belanda mengalami perubahan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan kebutuhan pihak kolonialis. Misalnya yang pernah terjadi di Langsa, beberapa *mukim* pernah dilebur menjadi satu wilayah yang diperintah oleh *uleëbalang cut* (hulubalang kecil). *Uleëbalang cut* bertugas di bawah otoritas *uleëbalang* setempat. Oleh karena itu, wilayah mukim hasil peleburan dari beberapa mukim tersebut pada waktu itu disebut juga sebagai *Uleëbalangtjoetschappen* (wilayah *uleëbalang cut*). Hal ini dilakukan atas dasar kebutuhan efisiensi administrasi pemerintahan. Contoh lain di Peureulak, sebelum tahun 1900 terdapat enam daerah *uleëbalangtjoet*. Setelah tahun 1900, wilayahnya menjadi empat *uleëbalangtjoet* saja, termasuk diantaranya wilayah sekitar Langsa (Mawardi, 2009: 46-47). Semulanya dalam proses peleburan *mukim*, hanya bertujuan untuk sinkronisasi wilayah yang sangat erat dengan kepentingan politik Belanda terutama untuk mempermudah mengontrol daerah-daerah yang mulai banyak dipenuhi kawasan perkebunan di wilayah *Onderafdeeling* Langsa.

Pemerintahan di Langsa mulai stabil ketika memasuki tahun 1908 yaitu ketika pemerintahan melakukan reorganisasi pemerintahan (*bestuurhervorming*) dan mengeluarkan undang-undangnya. Langsa sebagai daerah pusat kota (Langsa Tunong) yang paling ramai di Aceh Timur, ditetapkan menjadi ibukota *Afdeeling* Aceh Timur, sekaligus ibukota *Onderafdeeling* Langsa. Sejak itu, pemerintahan mulai berjalan baik serta kondisi keamanan juga semakin kondusif. Bila dibandingkan daerah Aceh lainnya pada waktu yang sama, kondisi keamanan di daerah Aceh Timur jauh lebih baik daripada daerah lainnya di Aceh.

Pada masa kolonial Belanda di Langsa, Banyak kemunduran telah terjadi di pemerintah *Mukim*. Sebelum tahun 1906 wilayah Langsa terdiri dari enam *mukim* yang meliputi wilayah: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Manyak Payed, Langsa, Langsa Tunong, dan Kuala Langsa. Kemudian setelah tahun 1907 keenam *mukim* tersebut dilebur menjadi empat *mukim* saja meliputi: Bayeun Langsa, Birem Rayeuk, Manyak Payed, dan Langsa (Boer, 1917: 74-75). Keempat *mukim* tersebut berada di bawah suatu wilayah pemerintahan daerah setingkat sub-distrik/kecamatan bentukan pemerintah kolonial yang disebut sebagai *Onderafdeeling* Langsa. Hal ini terjadi sejak pemerintah kolonial membuka perkebunan karet di Langsa sejak tahun 1907 untuk mempermudah pengontrolan terhadap situasi keamanan dan ketertiban di daerah-daerah sekitar kawasan perkebunan. Perubahan ini diperkuat dengan regulasi baru mengenai reorganisasi pemerintahan di Aceh yang diberlakukan pada tahun 1908 (*Staatsblad* 1908 No. 401). Sejak itu, *mukim* berada langsung di bawah Asisten Residen pada tingkat pemerintahan *Afdeeling*.

Perubahan lainnya terhadap lembaga *mukim* terjadi pada tahun 1927. Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan peraturan baru dalam *Regeerings Reglement voor Buitengewesten* atau Peraturan Pemerintah untuk Daerah-daerah Luar Jawa (*Staatsblad*

1927 No. 227 Pasal 324). Peraturan tersebut yang mengatur bahwa untuk daerah Aceh, para *Geuchik* (Kepala Desa) yang ditugaskan menjalankan tugas-tugas kepolisian dan mengusut kasus yang ada di masyarakat berdasarkan keterangan dari *Imeum Mukim*. Singkatnya *Imeum Mukim* membantu tugas dan fungsi *Geuchik*. Walaupun demikian, *Imeum Mukim* tetap diakui sebagai pemimpin wilayah mukim. Lembaga *mukim* dalam sistem pemerintahan di Aceh di kemudian hari diatur secara khusus dalam *Besluit van den Gouvernuer General van Nederlandsch Indie* tanggal 18 November Tahun 1937 Nomor 8. *Besluit* ini mengubah nama *mukim* menjadi *Imeum Schaap* sedangkan pemimpinnya tetap disebut sebagai *Imeum Mukim* (Mahdi Syahbandir, 2014: 9-10).

Mukim pada Zaman Pendudukan Jepang

Perubahan-perubahan yang terjadi terhadap lembaga *mukim* pada era kolonial Belanda sebenarnya tidak fundamental, hal ini tampak dari perubahan yang hanya ditukar sebutannya (Thamrin, 2008: 46). Sejak bala tentara Jepang menduduki Aceh pada tahun 1942, mereka mulai menyusun tata pemerintahan baru yang sesuai dengan kepentingannya di Aceh. Ternyata Jepang tidak banyak melakukan perubahan terhadap sistem pemerintahan yang telah diciptakan oleh pemerintah Belanda. Kebanyakan struktur dan lembaga pemerintahan peninggalan zaman Belanda masih diteruskan, hanya saja sebutannya diganti dengan nama Jepang, kecuali struktur dan lembaga militer mengikuti sistem militerisme Jepang. Demikian pula penguasa-penguasa atau pejabat-pejabat pemerintahan dipegang langsung oleh pembesar-pembesar militer Jepang (Mukhlis, 2015: 18).

Lembaga *mukim* pada zaman Jepang diberikan wewenangnya kepada para ulama yang tergabung dalam organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Jepang mengembalikan wewenang memimpin lembaga *mukim* kepada para ulama dari tangan *uleëbalang*. Tujuannya adalah agar Jepang mendapat dukungan dari para ulama yang dibutuhkan militansinya (Rahmadsyah, dkk. 2014: 18).

Mukim pada Periode Revolusi Kemerdekaan

Perubahan yang sangat fundamental bagi masyarakat Indonesia adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Revolusi Kemerdekaan bangsa Indonesia (1945-1950) adalah revolusi yang anti kolonial. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kolonialisme dipandang sebagai penghambat jalannya revolusi. Perubahan yang fundamental tersebut disertai timbulnya pergolakan-pergolakan sosial, perubahan struktur sosial dan politik, struktur kolonial dan feodal ke struktur masyarakat yang bercorak republik (Suyatno, dkk. 1989: 1).

Revolusi Kemerdekaan di Aceh memiliki proses yang sangat menarik. Sebab, para golongan ulama dan *uleëbalang* berkonflik. Mereka saling memperebutkan kedudukan sebagai elit sosial politik di Aceh. Terlebih lagi, golongan ulama mendapat dukungan sebagian besar masyarakat karena golongan *uleëbalang* pada masa sebelumnya sangat dimanjakan oleh Belanda. Hal ini menambah sikap sentimen anti-Belanda dan menyurutkan popularitas golongan *uleëbalang* di mata masyarakat Aceh yang mengalami

penderitaan pada zaman Belanda dan Jepang. Konflik terjadi karena kepentingan penguasaan wilayah. Pada akhirnya, golongan ulama yang diwakili PUSA memiliki pengaruh yang besar sebagai elite politik di Aceh (Muhammaddar, 2014: 1). Ulama waktu itu tidak hanya sebagai tokoh agama di Aceh, melainkan juga sebagai elite politik dan dipercaya kembali untuk memimpin lembaga *mukim* di seluruh daerah di Aceh.

Mukim pada Era Orde Baru

Langsa adalah salah satu kota di Aceh yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Hal ini dapat dilihat dari masih berfungsinya institusi-institusi adat di tingkat *gampong* atau Mukim (Alfian et al. 1976: 66). Di daerah pedesaan keberadaan *mukim* masih tetap dipertahankan oleh masyarakatnya, meskipun kedudukannya di tingkat nasional tidak ada sama sekali. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut tidak serta merta dapat menghapuskan secara total keberadaan lembaga adat *mukim* yang ada di Aceh.

Setelah sewindu (delapan tahun) Orde Baru berkuasa, pemerintah pusat mencoret lembaga *mukim* dari komponen pemerintahan daerah. Sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, *mukim* tidak lagi mendapat pengakuan dari pemerintah. Kedudukannya tidak lagi berada di dalam struktur pemerintahan Aceh. *Mukim* yang seharusnya dapat menjalin hubungan antara negara dengan rakyat tidak lagi dapat dikesampingkan oleh pemerintah pusat. Pemerintahan di daerah-daerah menjadi sangat sentralistik dan sangat “Jawa” di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Pemerintah Orde Baru menerapkan sistem sentralistik dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah mulai dari provinsi sampai ke desa. Pemerintah daerah dijadikan instrumen pemerintah pusat agar bisa melaksanakan semua kebijakan pusat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, pemerintah pusat tidak memperkuat daerah otonom, tapi memperkuat wilayah administrasi.

Meskipun Undang-undang tersebut berusaha menghilangkan fungsi *mukim*, namun keberadaan *Imuem Mukim* di Aceh tetap diakui oleh masyarakat. Hukum adat di Aceh walaupun tidak tertulis ternyata tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat tetap mengatur keberadaan tanah ulayat, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Aceh di luar hukum yang diberlakukan di negara Republik Indonesia. Padahal saat itu pemerintah pusat melalui Departemen Dalam Negeri tidak pernah mengetahui keberadaan *mukim* dalam tatanan pemerintahan di Aceh, kecuali sebagai biro desa saja (Kamaruddin, 2013: 42).

Dengan demikian struktur dan fungsi *mukim* pada masa Orde Baru telah hilang. Revitalisasi lembaga *mukim* seperti sebelum era Orde Baru belum menunjukkan upaya yang signifikan dan realistis. Hal ini baru terjadi setelah Indonesia memasuki era Reformasi. Lembaga *mukim* direvitalisasi kembali dan berada di bawah pemerintahan tingkat kecamatan serta menempatkan *mukim* sebagai lembaga perantara birokrasi yang telah ada dalam sistem pemerintahan khas otonomi daerah di Aceh.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini ditarik beberapa simpulan sebagai berikut: Pertama, lembaga *mukim* di Aceh telah ada sejak masa Sultan Alauddin Mansyur Syah (1579-1586) dan mengalami banyak perubahan pada zaman Kolonial Belanda, Pendudukan Jepang, dan Periode Reformasi Kemerdekaan. Eksistensi lembaga *mukim* berakhir pada era Orde Baru. Kedua, tidak semua lembaga tradisonal dipertahankan oleh kolonial, salah satu contohnya *Toeha Peuët*. Lembaga *mukim* tidak dihilangkan namun dimodifikasi sesuai kepentingan penguasa, misalnya *mukim* yang awalnya dipimpin oleh *Imuem Chik* diganti oleh *uleëbalang*. *Mukim* pada era kolonial Belanda menjalankan tugas dan fungsinya tanpa pengawasan dan dewan penasehat *Toeha Peuët*. Ketiga, lembaga *mukim* pada zaman Pendudukan Jepang diserahkan kepada golongan ulama di bawah organisasi PUSA. Sejak itu lembaga *mukim* kembali dipimpin oleh golongan ulama non-birokrat. Keempat, lembaga *mukim* pada era Orde Baru hilang sebagai lembaga pemerintahan daerah digantikan dengan sistem baru yang sentralistik khas Orde Baru. Kelima, sekalipun lembaga *mukim* mengalami perubahan struktur dan fungsi sejak zaman Kolonial Belanda bahkan dihilangkan pada era Orde Baru, namun ia tetap hidup dan diakui dalam hukum adat tidak tertulis yang tetap dijalankan dan ditaati oleh masyarakat Aceh. Akhirnya sejarah menjadi faktor utama lahirnya kembali lembaga *mukim* pada era Reformasi dalam struktur pemerintahan daerah Aceh yang otonom.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfian, T. I. 1976. *Perang di Jalan Allah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Andreski, S. 1989. *Max Weber: Kapitalisme, Birokrasi, dan Agama*. Yogyakarta Tiara Wacana.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Timur. 2002. *Profil Kota Langsa*. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: BPS Kab. Aceh Timur.
- Boer, K. H. de. 1917. *Memorie van Overgave van den Controleur van Onderafdeeling Langsa*, 10 Juli 1927. Serie 1e, M.F. 25, Film No. 9, Arsip Nasional Republik Indonesia.
- De Civiël en Militaire Gouvernour van Atjeh en Onderhoorigheden. 1914. *Extract uit het register der besluiten van den civielen en militairen Gouverneur van Atjeh en Onderhoorigheden*. Koetaradja, 30 Mei 1914.
- Encyclopaedisch Bureau, 1917. *Mededeelingen van Het Bureau voor de bestuurszaken der buitenbezittingen bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau de Buitenbezittingen*. Deel II, Aflevering 2. Atjeh en Onderhoorigheden.
- Husin, T., dkk. 2015. *Mukim di Aceh (Belajar dari Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan)*. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia.
- Kamaruddin. 2013. "Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat". *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. 21(1).
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5/650/OE/49 Tentang Pembentukan Kecamatan Langsa.

- Mawardi. 2005. "Menyadap Getah untuk Onderneming: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1900-1939". *Tesis*. Program Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada.
- Mawardi. 2009. *Menyadap Getah untuk Onderneming: Dinamika Sosial Ekonomi Buruh Perkebunan Karet di Aceh Timur, 1900-1939*. Banda Aceh: Unsyiah.
- Monografi Daerah Istimewa Aceh. 1976. *Monografi Daerah Istimewa Aceh*. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Muhajir, A. 2016. "Industrialisasi di Kota Langsa pada Era Kolonial: Dari Kapitalisme Negara ke Swasta 1907-1942". *Tesis*. Magister Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mukhlis. 2015. "Perkembangan Mukim di Aceh". *Jurnal Nanggroe*. Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.
- Muhammaddar. 2014. "Kedudukan Ulama dan Uleebalang sebagai Elit Sosial Politik Aceh (1900-1946)". *Tesis*. Program Pasca Sarjana IAIN Sumatera Utara.
- Rahmadsyah, dkk. 2014. *Menelusuri Jejak Sejarah Langsa*. Langsa: Humas Pemerintah Kota Langsa.
- Syahbandir, Mahdi. 2014. "Sejarah Pemerintahan Imeum Mukim di Aceh (The History of Imuem Mukim Governance in Aceh)". *Qanun: Jurnal Ilmu Hukum*. No. 62, Th. XVI (April, 2014), pp. 1-17.
- Suyatno, dkk. 1989. *Revolusi Nasional di Tingkat Lokal*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.
- Thamrin, 2008. *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme*. Banda Aceh: CV. Percetakan Dominan.
- Treffers, O. 1934. *Bestuurmementen Tevens Memorie van Overgave van den Controleur der Onderafdeeling Langsa*, 7 November 1934.
- Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
- Vleer, A.J. 1935. "De positie van den Toeha Peuët in het Atjehsche Staatsbestel". *Koloniale Studiën*. No. 6. December 1935.
- Zakir, M. 2013. "Johan Harmen Rudoft Kohler dan Perang Aceh, 1873". *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Samudra, Langsa.